

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah masih terus melakukan upaya berkelanjutan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan

kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Peranan laporan keuangan pemerintah berdasarkan SAP adalah menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan dan sebagai media akuntabilitas sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga pemerintah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk kemajuan laporan keuangan dalam mencapai prinsip-prinsipnya, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk kemajuan laporan keuangan pemerintah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan keberhasilan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang diharapkan dapat disajikan secara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pemerintah juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), hal yang mendasar adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten. Dari segi kuantitas, banyaknya sumber daya manusia di sektor pemerintahan dapat dikatakan relatif banyak. Akan tetapi, ditinjau dari segi kompetensi/kemampuan yang dimiliki, banyaknya sumber daya manusia berkompeten dinilai tidak cukup memadai.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008), menyebutkan bahwa kualitas informasi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Kompetensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Yosefrinaldi, 2013).

Informasi yang disajikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh sebab itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Wahyono (2004:12), informasi harus andal sebagai salah satu indikator berkualitasnya suatu informasi. Keterandalan disini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan bukan hanya di bidang akuntansi, tetapi juga pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan

dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal). Tidak dapat dihindari bahwa sumber daya manusia yang berkompeten adalah salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan apabila informasi tersebut disajikan secara tepat waktu dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan sangat dibutuhkan.

Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu organisasi dalam satu periode, begitu juga dalam entitas pemerintahan, maka dari itu jika tidak didukung dengan sumber daya yang kompeten, maka penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka diperlukan pula sumber daya manusia yang berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Nugraha, 2014). Sumber daya manusia yang mengelola keuangan dalam melaksanakan proses akuntansi harus mengikuti peraturan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Keuangan Negara dan peraturan Perbendaharaan Negara dan apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat menghambat proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2009, dinyatakan bahwa terhadap 348 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 14 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 259 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 30 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 45 entitas. Disamping itu, perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menunjukkan peningkatan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memiliki kekurangan dalam menyajikan laporan keuangan.

Dari beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah yang dapat diidentifikasi adalah penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun belum sepenuhnya memahami dan mengerti untuk melaksanakan akuntansi. Dalam menyusun laporan keuangan yang pada umumnya tidak memiliki disiplin ilmu dan bukan berasal dari pendidikan akuntansi, dapat menyulitkan SKPD untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Peristiwa yang terjadi mengenai pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah adalah kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan adalah aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, bahkan dinilai mampu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, sehingga pemerintah daerah membuat strategi atau program untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Selain kompetensi sumber daya manusia, yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap, dibutuhkan penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.

Penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah telah dilakukan. Akan tetapi, tidak banyak yang melakukan penelitian tersebut sehingga terdapat beberapa perbedaan pada hasil penelitian. Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Oleh sebab itu, hal ini yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai kompetensi

sumber daya manusia baik dalam pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan maupun pemanfaatan teknologi informasi yang dinilai dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti hanya mengambil fokus penelitian pada kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pada penelitian ini peneliti mencoba membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola keuangan daerah dapat meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul **“Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia dapat berkontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat berkontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi sumber daya manusia dapat berkontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat berkontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini lebih terfokus pada manfaat praktis untuk pengambilan keputusan terkait dengan peristiwa politik pemilihan umum yakni:

1. Untuk menambah pengetahuan serta memahami bagaimana kompetensi sumber daya manusia dapat berkontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menambah pemahaman tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat berkontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
3. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan.

1.5. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi dilakukan secara sistematis terdiri dari lima bab. Adapun uraian ide pokok yang terdapat pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi penyusunan penelitian ini, yakni kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dapat berkontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dapat berkontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Manfaat dari penelitian ini adalah memahami tentang bagaimana kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dapat berkontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai literatur yang mendukung penelitian ini diantaranya adalah literatur yang menjelaskan tentang fungsi penyelenggaraan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan, elemen-elemen laporan keuangan pemerintah, karakteristik laporan keuangan pemerintah, kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dan pemanfaatan teknologi

informasi. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan serta referensi pada penelitian ini dimana para peneliti sebelumnya pada umumnya menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya juga diuraikan kerangka berpikir yang menggambarkan arah dan model penelitian ini.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang dilakukan, yakni pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Jenis dan sumber data serta prosedur pengumpulan data juga dijelaskan dalam bab ini. Selanjutnya terakhir adalah menjelaskan teknik analisis data yang digunakan.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum subyek dan obyek penelitian. Selanjutnya dijelaskan pula pembahasan hasil penelitian yang telah diamati dan diobservasi dan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta ringkasan hasil penelitian.

Bab 5 Simpulan dan Saran

Merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.